

Daftar Pustaka

Buku :

- AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Ire Press, Yogyakarta
- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta
- Afifuddin, 2020, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Bratakusumah Deddy Supriady, Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Huda Ni'matul, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Ilmar Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mahfud MD Moh, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mahmud Peter, 2013, *Peneilitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Hadari, 1995, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta
- P.Saragi Tumpal, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, CV.Cipruy, Jakarta, 2004
- Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Syafrudin Ateng, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Thoha Miftah, 2008, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Kencana, Jakarta

Hasil Penelitian (Skripsi/tesis/disertasi, Jurnal, Makalah, Buletin) :

Arvindo Adjie, Pandnag Fiqh Siyasah Terhadap, Implementasi Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Tahun 2020

Candra Kusuma Putra,Ratih Nur Pratiwi,Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi*, Vol I, No.6, Tahun 2017

Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaowan, dan Johny P.Lengkong, Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur), *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.1, 2017

Isnaeni, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, *Laporan Pengkajian Hukum*, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Tahun 2011

Iqbal Muh, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah, *Skripsi* ,Universitas Hasanuddin,Tahun 2016

L.O Suprianto, Muh Arsyad & Megawati A. T,2017, *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak*, Sulawesi Tenggara

Mu'in Fathul, Pandangan Hukum islam Terhadap demokrasi Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Tahun 2019

Purwanto Rahmad, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Era Digital, *Mimbar Administrasi*, UNTAG Semarang, Vol 15 No 19, Tahun 2019

Satria Adhi Putra, Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia, *Kosmik Hukum*,FH Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.20 No.1, Tahun 2020

Saputro Deny Wahyu, Tugas Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Pemilu di Jawab Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Repository UNPAS*,FH UNPAS, Tahun 2018

Sugiman, Pemerintah Desa, *Binamulia Hukum*, vol.7 No.1, Tahun 2018

Sumeru Arief, Kedudukan pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Universitas Airlangga, Vol.4 No.1, 2016

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

